



SINKRONISASI APLIKASI E-SKP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur

SURABAYA, 20 APRIL 2019



VISI & MISI GUBERNUR TERPILIH



Misi

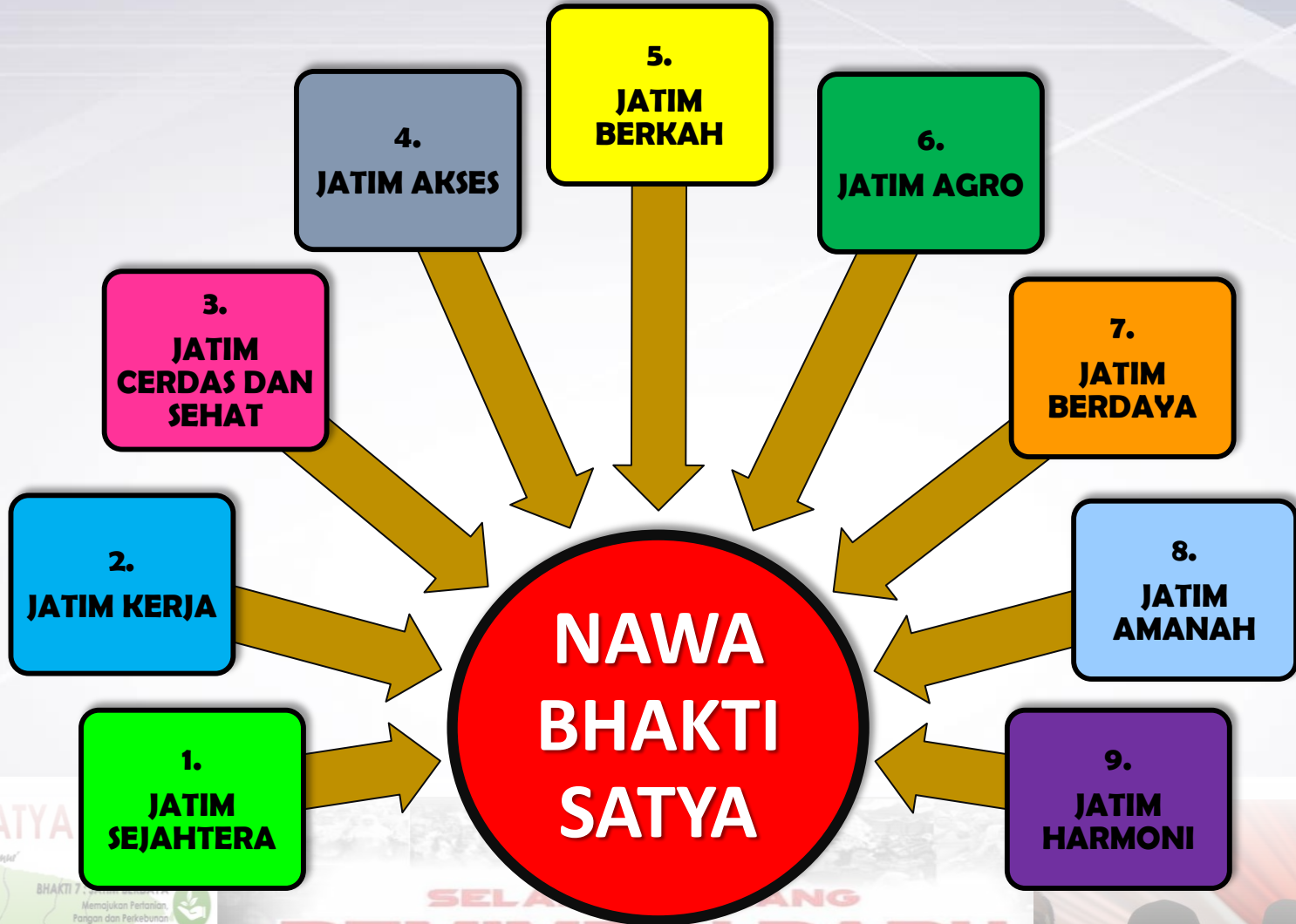
Visi Draft RPJMD 2019 - 2023 :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris dan Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

1. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor Maupun Antar Wilayah ;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial Dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan ;
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan Serta Membangun Kedaulatan Pangan ;
4. Kemudahan akses Terhadap lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan wilayah ;
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Partisipatoris ;
6. Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Menghargai Prinsip Kebhinekaan ;
7. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya



Pemerintah Provinsi Jawa Timur



1. JATIM SEJAHTERA
Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Keadilan Sosial; Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Umat

2. JATIM KERJA
Membangun Infrastruktur, Mempermudah Akses Pembangunan Wilayah Selatan Jawa dan Kepulauan

3. JATIM CERDAS DAN SEHAT
Memperluas Lapangan Pekerjaan; Pengangguran dan Tenaga Kerja

4. JATIM AKSES
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Pmpes, Guru, Madin, Siswa Miktit dan Prestasi

5. JATIM BERKAH
Mempermudah Akses dan Meningkatkan Mutu Kesehatan; Ibu, Perempuan, Anak dan Faskes

6. JATIM AGRO
Memberdayakan Masyarakat Pesisir Nelayan, Perdesaan dan Jatim Terluar

8. JATIM AMANAH
Memperkuat Industri Perdagangan, Koperasi Menuju Ekonomi Berdikari

9. JATIM HARMONI
Merawat Kebudayaan Lokal, Pariwisata dan Perlindungan Alam



BHAKTI 8

Jatim Amanah

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi

Melembagakan sistem meritokrasi;

Menyelenggarakan *complaint handling system*, budaya birokrasi yang melayani;

Mendorong *sound governance*, perluasan dan pelayanan berbasis IT dan introduksi *e-government* dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;

Membangun birokrasi yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi. Kepala daerah mengawal langsung pelaksanaan poin birokrasi yang berdaya guna dan anti korupsi;

Tata kelola anggaran dan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Sistem pengendalian internal yang kredibel dan berstandar atau berkualitas terbaik.

JATIM CETAR

- **Cepat**
- **Efektif & Efisien**
- **Tanggap**
- **Transparan**
- **Akuntabel**
- **Responsif**



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

3 Angka Pertumbuhan Ekonomi

4 Persentase Penduduk Miskin

5 Indeks Gini

6 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

7 Indeks Demokrasi Indonesia

8 Indeks Infrastruktur

9 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Manajemen Perubahan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B.Organisasi

B.Hukum
Bakesbang

B.Organisasi

B.Organisasi
Kominfo
Arsip & Perpus

BKD
B.Organisasi

B.Organisasi
B. AP

Inspektorat
BPKAD
B.AP
DP3AK

Kominfo
DPMPTSP
B.Organisasi

PETA JALAN PEMBANGUNAN ASN

RPJM 1 (2020-2009)

**GOOD
GOVERNANCE**

RPJM 4 (2010-2014)

**REFORMASI
BIROKRASI**

RPJM 3 (2015-2019)

**SISTEM
MERIT**

RPJM 4 (2020-2024)

**BIROKRASI
BERKELAS DUNIA**

SISTEM MERIT (2014-2019)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT OLEH KASN :



1	D.I YOGYA	319,0
2	DKI JAKARTA	317,5
3	JAWA BARAT	305,5
4	JAWA TENGAH	296,5
5	JAWA TIMUR	272,5



KOMISI APARATUR
SIPIIL NEGARA

PENILAIAN SISTEM MERIT



Kategori I BURUK
(100 - 174)

Dibimbing intensif
agar memenuhi
persyaratan



Kategori III BAIK
(250 -324)



Kategori II KURANG
(175 - 249)

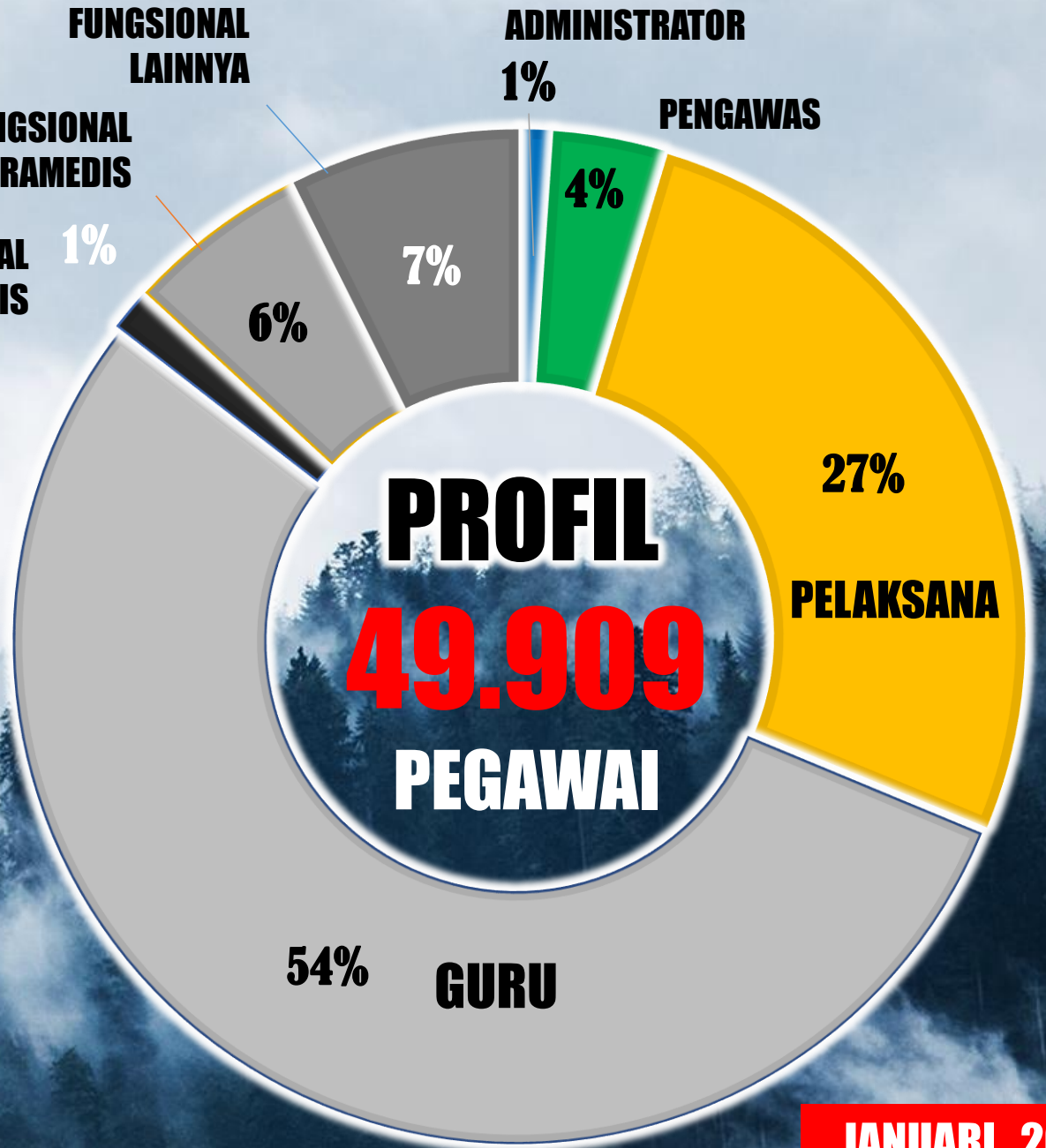
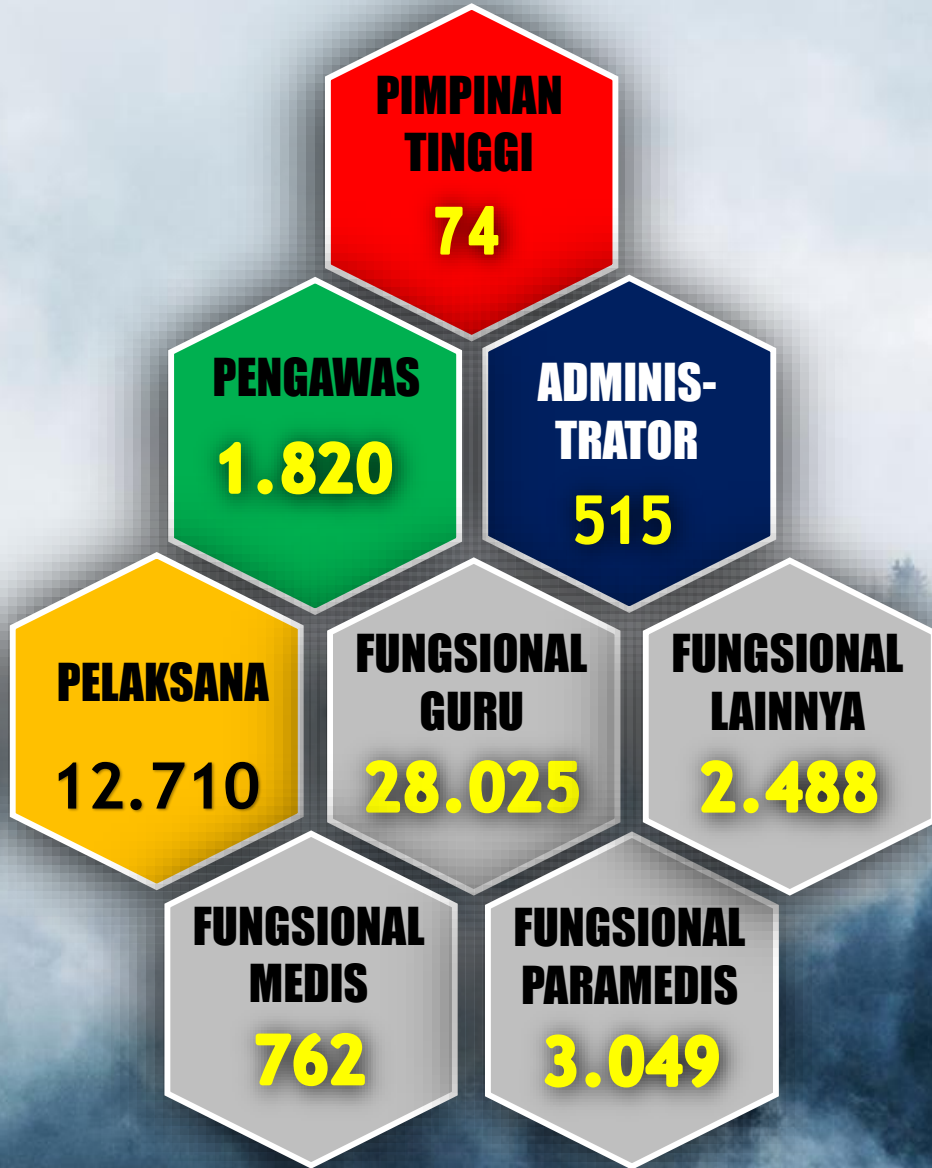
Dibimbing agar
memenuhi persyaratan



Kategori IV BAIK SEKALI
(325 -400)

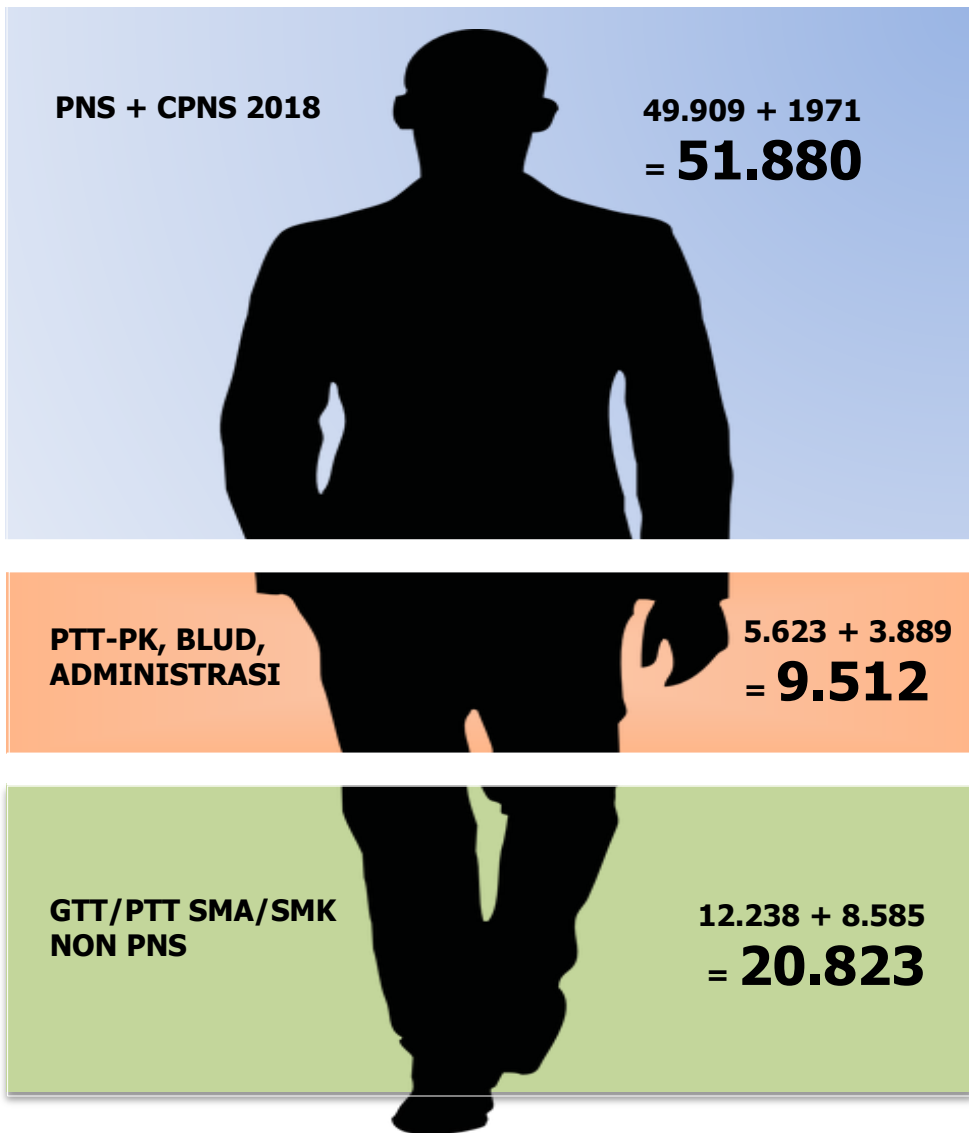
PROFIL & POTENSI ASN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



JANUARI 2019

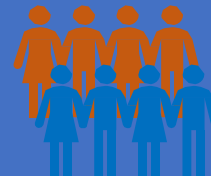
POSTUR APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PASCA UU 23 TAHUN 2014



STATUS ASN

Pelimpahan kewenangan pengelolaan tenaga pendidik dan non pendidik, serta tenaga fungsional lainnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan berita acara serah terima pada 31 Oktober 2016 yang berlaku mulai 1 Januari 2017.

JUMLAH



ASN PEMPROV JATIM :

82.215 orang

Jumlah GTT/PTT pada SMA dan SMK tersebut menyebar di 875 SMA/SMK dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

*data e-Master 2019

TANTANGAN ASN KEDEPAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

STATUS PEGAWAI NON-PNS



Penyelesaian PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1. Pemetaan jabatan fungsional pada SKPD
2. Pemetaan kualifikasi dan kompetensi PTT-PK
3. Peningkatan kompetensi PPPK diarahkan pada kualifikasi jabatan fungsional

Penting!

1. Berdasarkan PP 49/2018 mekanisme penyelesaian GTT/PTT/PTT-PK/PTT-PK BLUD menjadi PPPK melalui seleksi selama 5 tahun
2. Sebanyak 9.512 PTT-PK, BLUD, dan ADMINISTRASI untuk menjadi PPPK telah tersedia anggaran/gaji di OPD masing-masing.
3. Sebanyak 20.823 GTT/PTT untuk menjadi PPPK Pemprov perlu menyediakan gaji dan tunjangan – **“Belum dianggarkan”**.
4. **Per tahun diperkirakan sebanyak 6.067 alokasi formasi untuk menyelesaikan GTT/PTT/PTT-PK/PTT-PK BLUD menjadi PPPK**
5. Jabatan PPPK adalah jabatan fungsional. Kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional minimal Diploma sedangkan GTT/PTT/PTT-PK/PTT-PK BLUD banyak masih kuafikasi SMA.

Pegawai Non-PNS Pemprov Jatim

30.335 orang:

- GTT/PTT/PTT-PK
- Honorer (K2 : 198 orang)
- BLUD

PP NO. 49 TAHUN 2018
ttg Manajemen PPPK

PPPK

5 Tahun

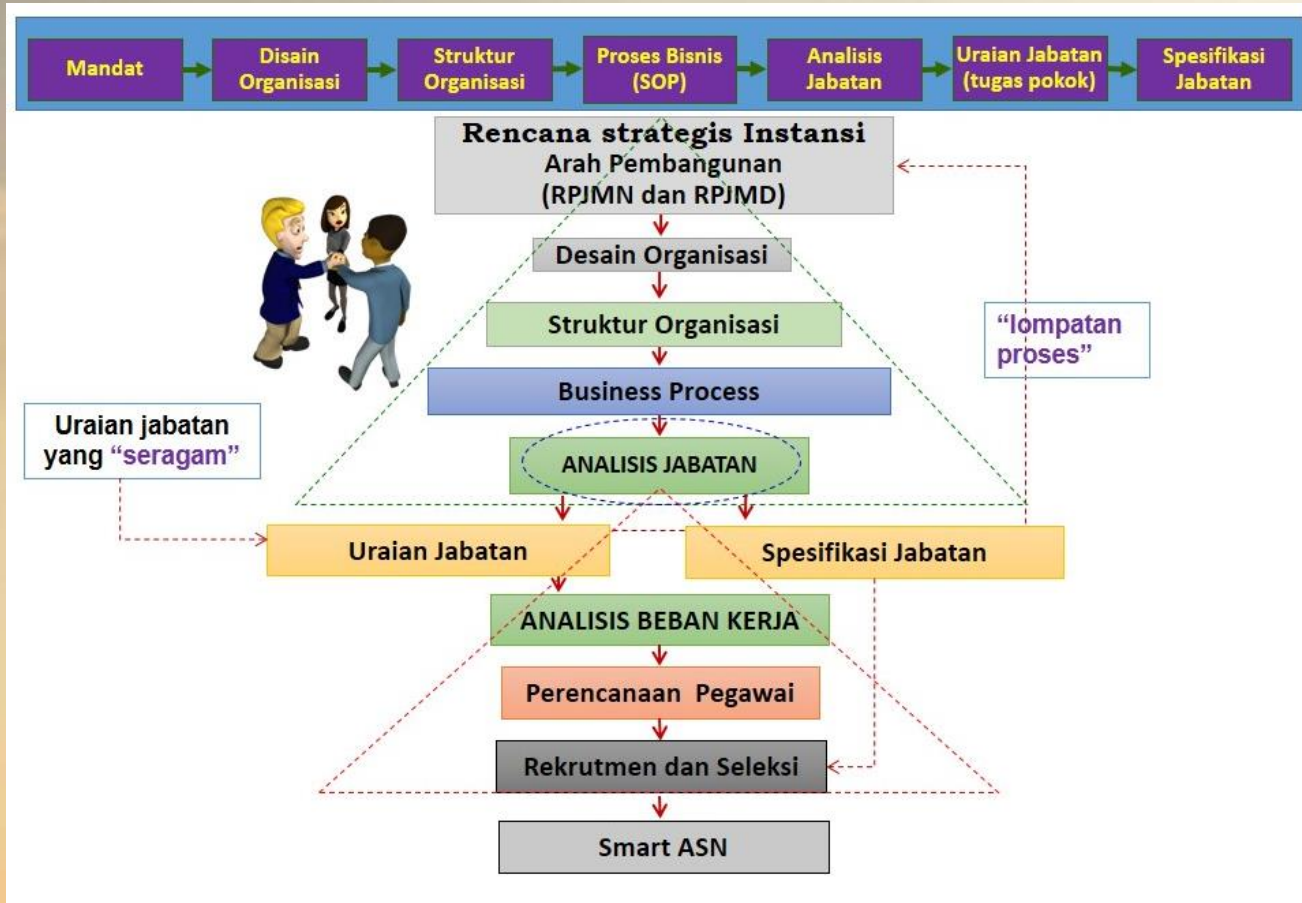
FOKUS MANAJEMEN ASN PEMPROV JAWA TIMUR





1

PERENCANAAN



NAWA BHAKTI SATYA

- 1) SEJAHTERA
- 2) KERJA
- 3) CERDAS DAN SEHAT
- 4) AKSES
- 5) BERKAH
- 6) AGRO
- 7) BERDAYA
- 8) AMANAH
- 9) HARMONI

Fokus Perencanaan SDM:

Pemenuhan SDM untuk optimalisasi pencapaian RPJMD Jawa Timur

Dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kehilangan 12.816 pegawai akibat pensiun. Dari jumlah dimaksud, 1.184 adalah Jabatan Struktural, 7.761 Jabatan Fungsional dan 3.871 Jabatan Pelaksana. → **DARURAT PNS**



REKRUTMEN CPNS 2018

FORMASI JABATAN PROVINSI JAWA TIMUR:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **2.065** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Guru : 826 formasi terdiri dari 88 jabatan
- b. Kesehatan : 797 formasi terdiri dari 73 jabatan
- c. Teknis : 442 formasi terdiri dari 71 jabatan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan alokasi formasi untuk Eks Tenaga Honorer Kategori II



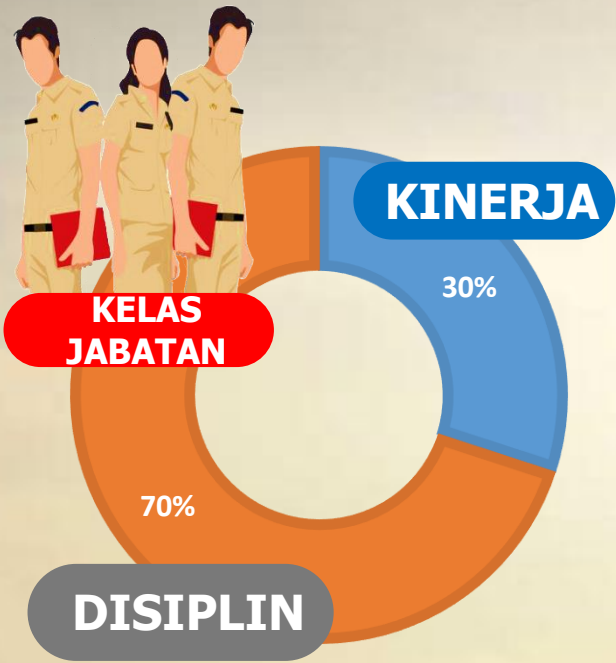
Mekanisme pindahan Jabatan:
 Sertifikat Kompetensi bagi ASN yang meningkat kompetensinya, baik melalui Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Pengembangan Kompetensi Berbasis Jabatan:



PENETAPAN
TARGET KERJA

PENILAIAN
KINERJA



TPP / REMUNERASI

Beban Kerja

Kondisi/Resiko kerja

Prestasi Kerja

Pertimbangan Objektif

**PENILAIAN
KINERJA DAN**

4

TPP	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
DISIPLIN	70	60	50	40
KINERJA	30	40	50	60



PERFORMANCE

PROMOSI,
ROTASI
DAN KARIR

5

Assessment JPT

Assessment Administrator

Assessment Pengawas

Dipetakan menjadi 4 kuadran berdasar
Potensi, **Kompetensi** dan **Kinerja**

POTENSI
(Hasil Psikotes)

Kemampuan yang **BELUM**
teraktualisasi dalam perilaku,
a.l. intelegensi, minat, bakat,
kepribadian

MAU

KOMPETENSI
(Hasil Assessment)

Kemampuan yang **SUDAH**
teraktualisasi dalam perilaku, a.l.
pengetahuan, hard skill, soft skill

MAMPU

KINERJA
(SKP & Penilaian Atasan
langsung)

Kemampuan terwujud dalam
perilaku di tempat kerja a.l.
efektif dalam mencapai target
kerja

MAMPU
(SESUAI SASARAN)

6



PURNABHAKTI

PREDIKSI	2019	2020	2021	2022	2023
PENSIUN	1965	2528	2549	2869	2905
JABATAN STRUKTURAL	240	256	228	256	204
JABATAN PELAKSANA	648	844	820	797	762
JABATAN FUNGSIONAL	1077	1428	1501	1816	1939

KONVENSIONAL



- Mengisi Formulir SPP
- Lampiran banyak
- Urus sendiri



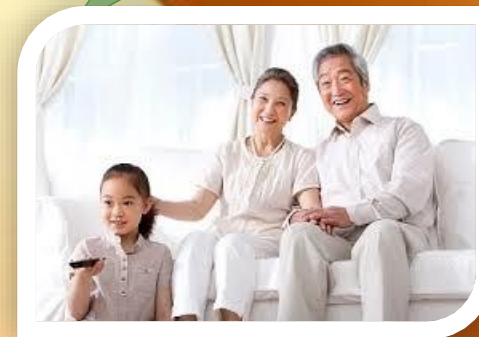
KLIM OTOMATIS



Layanan Klaim Otomatis

Proses Klaim maksimal 1 jam

Dokumen persyaratan diurus oleh Taspen dan Instansi terkait.



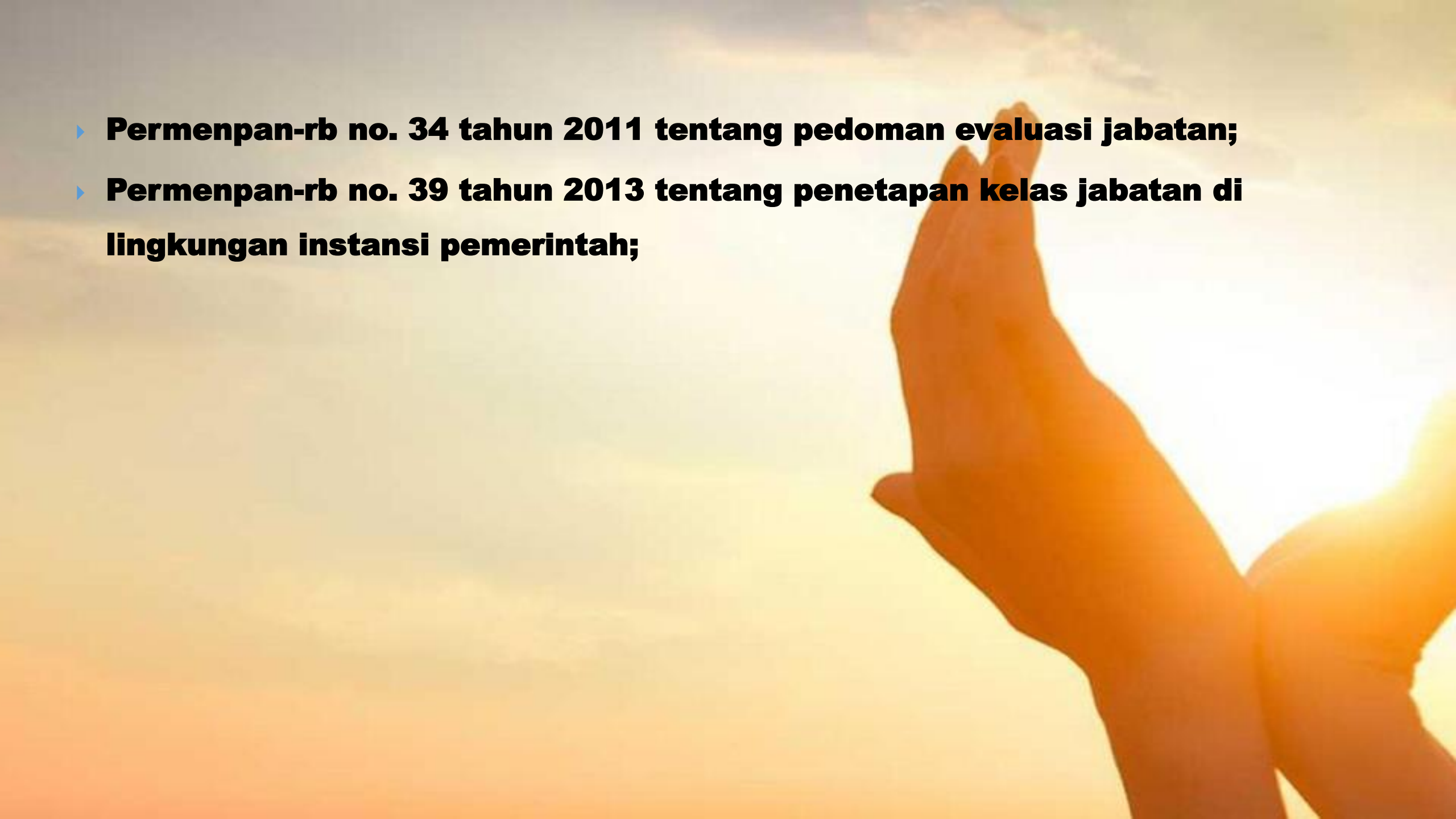
- Tidak perlu datang
- TASPEN proaktif
- Surprise saat jatuh tempo pensiun

A hand is shown in silhouette, reaching upwards towards a bright sun in a cloudy sky. The sun is positioned on the right side of the frame, creating a strong lens flare and illuminating the clouds with a warm, golden light. The hand is positioned on the right side, with fingers slightly curled as if reaching for something. The overall mood is one of aspiration and hope.

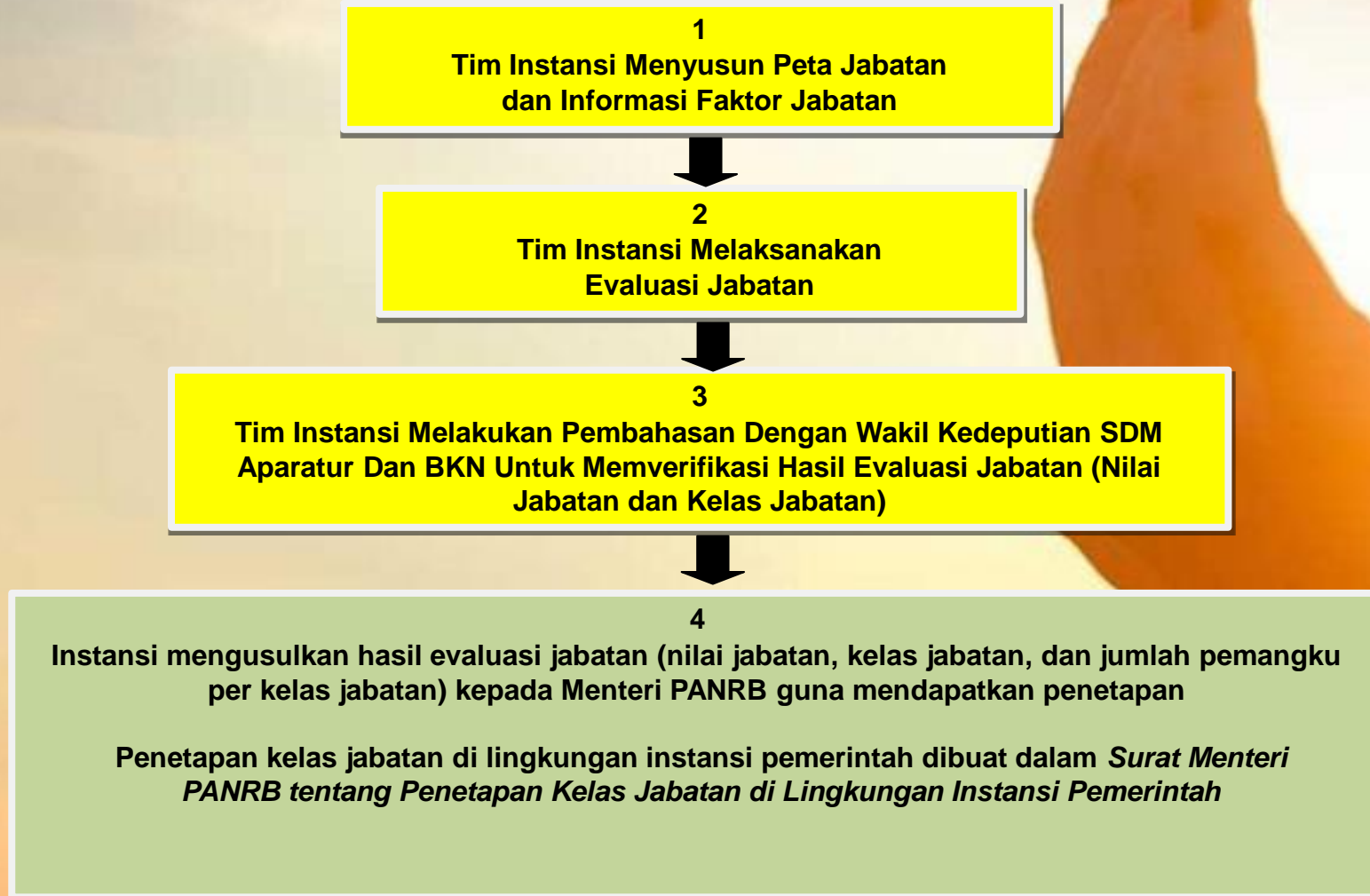
SASARAN KINERJA PEGAWAI

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS**
- 2. Permenpan 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan;**
- 3. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum;**
- 4. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;**
- 5. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP.**
- 6. Pergub Jatim No. 126 Thn. 2018 Tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan PemProv. Jatim.**

- 
- A hand is shown in silhouette, reaching upwards against a bright, hazy sky. The hand is positioned on the right side of the frame, with the fingers slightly spread. The background is a soft, warm glow of light, suggesting a sunrise or sunset. The overall mood is one of aspiration and reaching for goals.
- ▶ **Permenpan-rb no. 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan;**
 - ▶ **Permenpan-rb no. 39 tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah;**

ALUR PENETAPAN PERINGKAT / KELAS JABATAN (PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2013)



- **EVALUASI JABATAN**

Suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria – kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Evaluasi jabatan di lingkungan Pegawai Negeri dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan;

- **PETA JABATAN**

Susunan Jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja

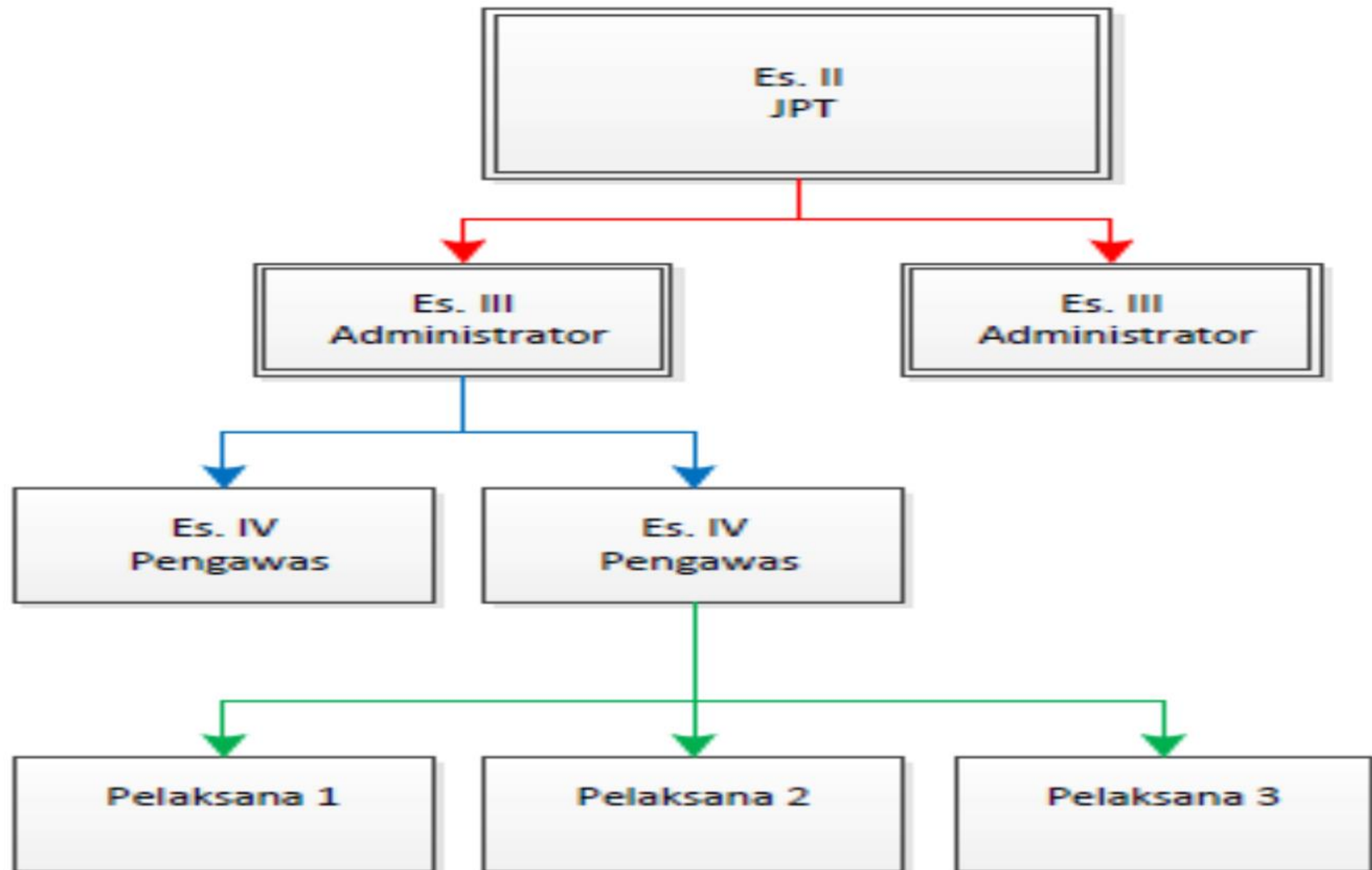
- **INFORMASI FAKTOR JABATAN**

Data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan structural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan structural maupun jabatan fungsional dan sumber – sumber lain misalnya hasil wawancara.

PENYUSUNAN SKP PNS

Kegiatan Tugas Pokok Jabatan yg akan dilakukan harus :

Eselon 1	Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Jafung/ Pelaksana
<p>Mengacu pada Renstra dan RKT yg dijabarkan sesuai tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sbg. kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I</p>	<p>Mengacu pada SKP eselon I dijabarkan sesuai tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sbg. kegiatan SKP pejabat struktural eselon II</p>	<p>Mengacu pada SKP eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sbg. kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III</p>	<p>Mengacu pada SKP eselon III (SKK) dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sbg. kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV</p>	<p>Mengacu pada SKP eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sbg. kegiatan dalam SKP Jafung</p>



**REALISASI BULANAN
PADA TAHUN BERJALAN / REMUNERASI**

A
W
A
L

T
A
H
U
N

Tapkin Jabatan Struktural

Tapkin Jabatan Fungsional

Tapkin Jabatan Pelaksana

Penyusunan Target SKP

Verifikasi SKP

Penetapan SKP

Breakdown Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Tugas Tambahan

Kreativitas

Realisasi SKP Akhir Tahun

Sasaran Kerja (60%)

Perilaku Kerja (40%)

AKHIR
TAHUN

Nilai Prestasi Kerja



LANGKAH – LANGKAH DALAM MELAPORKAN SKP

1. Setiap ASN wajib melaporkan hasil pekerjaannya secara periodik per bulan untuk direkap sebagai dasar dalam pemberian tunjangan;
2. Fasilitator merekap hasil pekerjaan ASN dan ditanda tangani oleh Kepala OPD sebagai dasar pengajuan pencairan TPK ke BPKAD.

Pemberian TPP Prestasi Kerja kepada PNS dan CPNS mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan tingkat kehadiran dalam mengikuti ketentuan jam kerja yang diakumulasikan setiap bulan; dan
- 30% (tiga puluh persen) berdasarkan hasil capaian kinerja sesuai dengan data kinerja dari aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi setiap bulan.

Pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d. 50% dikenakan hukuman sedang

Capaian SKP dibawah 25% dikenakan hukuman berat

(PP No. 53 Tahun 2010 pada Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 tentang Disiplin PNS)

Terima Kasih...

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani 1 Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477104
SURABAYA 60236



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur

HASIL REKOMENDASI RAPAT SINKRONISASI PADA APLIKASI E-SKP

- Bagi seluruh Fasilitator Organisasi Perangkat Daerah ***Tidak diperbolehkan*** untuk memasukkan atau merubah kelas jabatan sendiri melalui aplikasi e-master. Kelas Jabatan ***harus sesuai*** dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kelas Jabatan
- Kelas Jabatan yang saat ini digunakan adalah kelas jabatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 Tahun 2019;
- Untuk pencantuman biaya pada aplikasi e-skp hanya untuk pejabat structural ***yang menjabat*** sebagai KPA dan PA;

- Sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan perlindungan hukum ASN mempunyai fungsi **Melaksanakan Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja**, untuk itu seluruh informasi yang terkait dengan pengisian e-skp Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah di Bidang PKPH;
- Evaluasi Kelas Jabatan akan dilaksanakan setelah 1 (satu) semester pemberlakuan TPP Remunerasi dan akan dilaksanakan sesuai Permenpan 34 tahun 2011
- Hasil Penilaian Kinerja Personal pada Aplikasi e-skp Personal **dikirim ke BKD** paling lambat tanggal 5 pada hari kerja bulan berikutnya